BAB III
OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN

1.1 Sejarah BPS (Badan Pusat Statistik)

Badan Pusat Statistik merupakan Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomer 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua UU tersebut ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan UU ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan dibawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik. Materi yang merupakan muatan baru dalam UU Nomor 16 Tahun 1997, antara lain :

a. Jenis statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya terdiri atas statistik dasar yang sepenuhnya diselenggarakan oleh BPS, statistik sektoral yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah secara mandiri atau bersama dengan BPS, serta statistik khusus yang diselenggarakan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya secara mandiri atau bersama dengan BPS.
b. Hasil statistik yang diselenggarakan oleh BPS diumumkan dalam Berita Resmi Statistik (BRS) secara teratur dan transparan agar masyarakat dengan mudah mengetahui dan atau mendapatkan data yang diperlukan.

c. Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien.
d. Dibentuknya Forum Masyarakat Statistik sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat statistik, yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada BPS.

Pada tanggal 26 September 1997 dengan Undang-undang No. 16 tahun 1997 tentang Statistik, Biro Pusat Statistik diubah menjadi "Badan Pusat Statistik" dan sekaligus tanggal 26 September ditetapkan sebagai "HARI STATISTIK". Tahun 1998, ditetapkan Keputusan Presiden No. 86 tahun 1998 tentang Badan Pusat Statistik. Berdasarkan KEPPRES tersebut Perwakilan BPS di daerah adalah instansi vertical dengan nama BPS Propinsi, BPS Kabupaten dan BPS Kotamadya.

Tahun 2001, ditetapkan Keputusan Presiden No. 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah non Departemen (LPND). Salah satu LPND adalah Badan Pusat Statistik. Pada tahun 2001, ditetapkan Kepala Badan Pusat Statistik No. 121 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di daerah. Perwakilan BPS di daerah terdiri dari BPS Propinsi dan BPS Kabupaten/Kota. Berdasarkan Keputusan Kepala BPS No. 121 tahun 2001 organisasi BPS Propinsi terdiri dari Kepala, Bagian Tata Usaha, Bidang Statistik Sosial, Bidang Statistik Produksi, Bidang Statistik Distribusi, Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik, Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik dan Kelompok Jabatan Fungsional.

1.2 Tentang Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Jawa Barat

Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Barat (BPS JABAR) bertempat di Jl. PHH. Mustofa No.43 Bandung. BPS Propinsi Jawa barat dipimpin oleh Kepala BPS Propinsi Jawa Barat yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.

3.3 Bidang Pekerjaan dan Tujuan Perusahaan

Dalam melaksanakan tugas diatas BPS Propinsi Jawabarat menyelenggarakan fungsi :

a. Pengumpulan pengolahan, serta evaluasi dan laporan statistik dasar yang meliputi statistik kependudukan statistik produksi, statistik distribusi, dan neraca wilayah.
b. Koordinasi dan kerjasama statistik dengan instansi pemerintah, swasta, lembaga, organisasi, perseorangan atau unsur masyarakat lain.
c. Penghimpunan, pengolahan dan pengembangan rujukan statistik, serta pemberian rekomendasi penyelenggaraan statistik kepada instansi pemeritah di tingkat propinsi.
d. Penyiapan bahan untuk pengembangan pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran, serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendukung penyelenggaraan statistik.
e. Pelayanan informasi statistik dan penyebarluasan hasil statistik kepada pemerintah dan masyarakat serta upaya peningkatan sadar statistik bagi masyarakat.

f. Pembinaan penyelanggaraan kegiatan statistik, responden, dan pengguna statistik.

3.4 Visi Dan Misi

Visi dan misi Badan Pusat Statistik Rencana Strategis Badan Pusat Statistik (Renstra BPS) Tahun 2010-2014 disusun berlandaskan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan RPJM Nasional Tahun 2010-2014

1.4.1 Visi

"Pelopor data statistik terpercaya untuk semua (The Agent of trustworthy statistical data for all)" Terwujudnya informasi statistik yang terpercaya dan tepat waktu sebagai tulang punggung informasi di Jawa Barat serta menjadi bagian sumber data untuk sistem statistik nasional

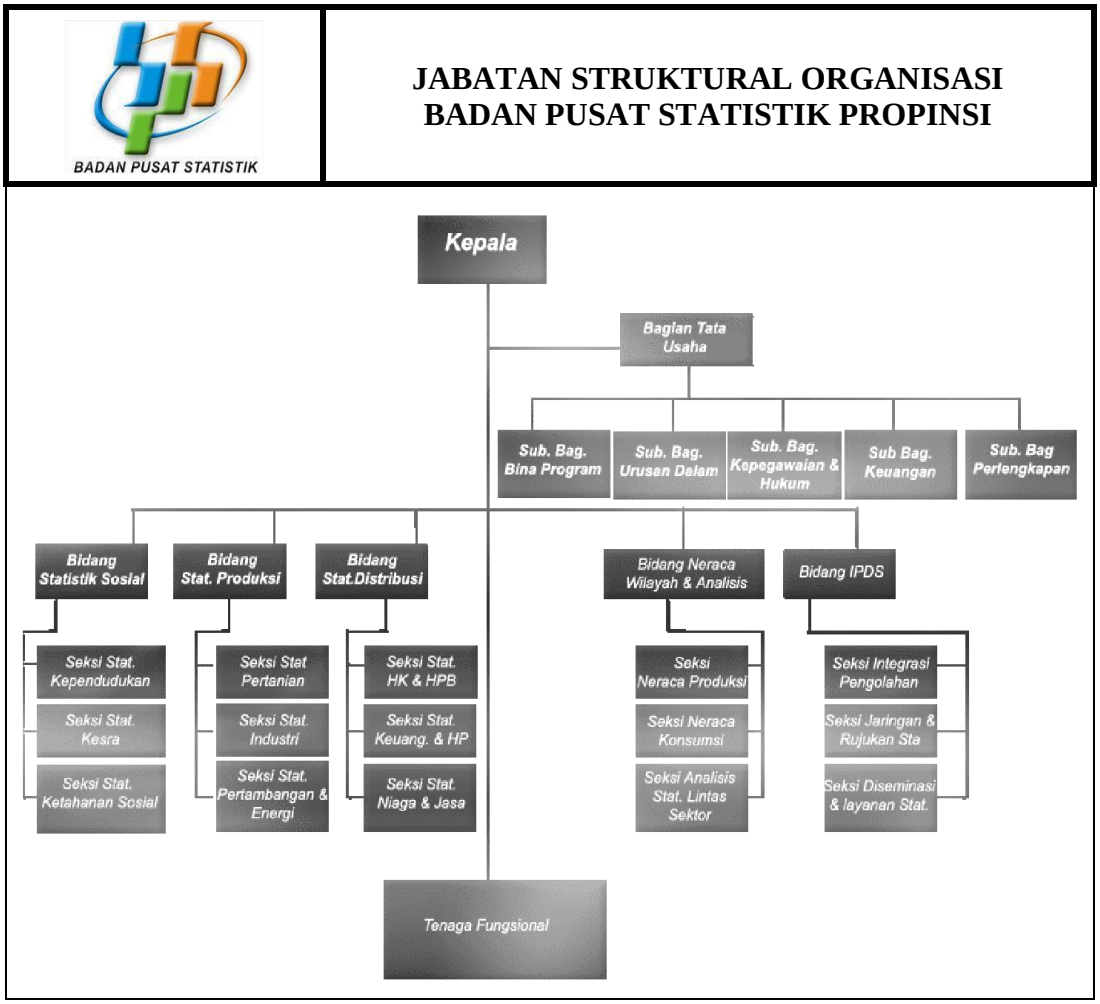
3.4.2 Misi

1. Memperkuat landasan konstitusional dan operasional lembaga statistik untuk penyelenggaraan statistik yang efektif dan efisien.
2. Menciptakan insan statistik yang kompeten dan profesional, didukung pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuan perstatistikan Indonesia.
3. Meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep dan definisi, pengukuran, dan kode etik statistik yang bersifat universal dalam setiap penyelenggaraan statistik.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik bagi semua pihak.

5. Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah dan swasta, dalam kerangka Sistem Statistik Nasional (SSN) yang efektif dan efisien.

3.5 Struktur Organisasi

Berdasarkan peraturan kepala badan pusat statistik nomor 7 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja badan pusat statistik. Berikut adalah gambaran struktur organisasi jabatan di badan pusat statistik Propinsi Jawa barat secara umum :



Gambar 3.1. Jabatan Struktural Organisasi BPS Prop. Jawa Barat

1.5.1 Deskripsi Pekerjaan

1. Subbagian Tata Usaha meliputi :

a. Menyusun program kerja tahunan Subbagian Tata Usaha;

b. Melakukan penyiapan bahan dan penyusunan rancangan usulan program kerja dan anggaran tahunan BPS Kabupaten/Kota baik rutin maupun proyek dan menyampaikan ke BPS Propinsi;

c. Mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan ketatausahaan;

d. Melakukan penyiapan, penyusunan rencana dan program, serta pengadaan, penyaluran, penyimpanan, inventarisasi, penghapusan, dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan

e. Melakukan kegiatan tata usaha kepegawaian, pengadaan dan mutasi pegawai, pembinaan pegawai, hukum dan perundang-undangan, organisasi dan tata laksana, kesejahteraan pegawai, administrasi jabatan fungsional, serta penggajian;

2. Seksi Statistik Sosial meliputi:

a. menyusun program kerja tahunan Seksi Statistik Sosial;

b. melakukan penyiapan dokumen dan bahan yang diperlukan untuk kegiatan pengumpulan statistik sosial yang mencakup kegiatan statistik kependudukan, kesejahteraan rakyat, ketahanan sosial, serta kegiatan statistik sosial lainnya yang ditentukan;

c. mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan statistik sosial;

d. membantu Kepala BPS Kabupaten/Kota dalam menyiapkan program pelatihan petugas lapangan kegiatan statistik sosial;
e. melakukan pembagian dokumen dan peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan lapangan kegiatan statistik sosial;
f. melakukan pembinaan, pengamatan lanjut, dan pengawasan lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan statistik sosial;
g. melakukan penerimaan dan pemeriksaan dokumen hasil pengumpulan data statistik sosial;
h. melakukan pengolahan data statistik sosial sesuai dengan sistem dan program yang ditetapkan, bekerja sama dengan satuan organisasi terkait;

3. Seksi Statistik Produksi meliputi:

a. Menyusun program kerja tahunan Seksi Statistik Produksi.
b. Melakukan penyiapan dokumen dan bahan yang diperlukan untuk kegiatan pengumpulan statistik produksi yang mencakup kegiatan statistik pertanian, industri, pertambangan, energi, konstruksi, serta kegiatan statistik produksi lainnya yang ditentukan;
c. Mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan statistik produksi;
d. Membantu Kepala BPS Kabupaten/Kota dalam menyiapkan program pelatihan petugas lapangan;
e. Melakukan pembagian dokumen dan peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan lapangan kegiatan statistik produksi;

f. Melakukan pembinaan, pengamatan lanjut, dan pengawasan lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan statistik produksi;
g. Melakukan penerimaan dan pemeriksaan dokumen hasil pengumpulan data statistik produksi;
h. Melakukan pengolahan data statistik produksi sesuai dengan sistem dan program yang ditetapkan, bekerja sama dengan satuan organisasi terkait.

4. Seksi Statistik Distribusi meliputi :

a. Menyusun program kerja tahunan Seksi Statistik Distribusi.
b. Melakukan penyiapan dokumen dan bahan yang diperlukan untuk kegiatan pengumpulan statistik distribusi yang mencakup kegiatan statistik harga konsumen dan perdagangan besar, keuangan dan harga produsen, niaga dan jasa, serta kegiatan statistik distribusi lainnya yang ditentukan.
c. Mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan statistik distribusi;
d. Membantu Kepala BPS Kabupaten/Kota dalam menyiapkan program pelatihan petugas lapangan;
e. Melakukan pembagian dokumen dan peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan lapangan;
f. Melakukan pembinaan, pengamatan lanjut, dan pengawasan lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan statistik distribusi;
g. Melakukan penerimaan dan pemeriksaan dokumen hasil pengumpulan data statistik distribusi;

5. Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik meliputi :

a. Menyusun program kerja tahunan Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik.

b. Melakukan penyiapan dokumen dan bahan yang diperlukan untuk penyusunan neraca wilayah dan analisis statistik yang mencakup penyusunan neraca produksi, neraca konsumsi dan neraca lainnya, analisis dan pengembangan statistik, serta penyusunan neraca wilayah dan analisis statistik lainnya yang ditentukan;

c. Mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan neraca wilayah dan analisis statistik.

d. Membantu Kepala BPS Kabupaten/Kota dalam menyiapkan program pelaksanaan petugas lapangan;

e. Melakukan pembagian dokumen dan peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan lapangan;

f. Melakukan pembinaan, pengamatan lanjut, dan pengawasan lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan neraca wilayah;

g. Melakukan penerimaan serta pemeriksaan dokumen hasil pengumpulan data neraca wilayah;

b. Melakukan pengolahan data neraca wilayah sesuai dengan sistem dan program yang ditetapkan, bekerja sama dengan satuan organisasi terkait;

6. Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik meliputi :

a. Menyusun program kerja tahunan Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik;
b. Melakukan penyusunan, pemeliharaan, penyelesaian permasalahan, dan penerapan sistem jaringan komunikasi data sesuai dengan aturan yang ditetapkan serta membantu penerapan teknologi informasi
c. Mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan integrasi pengolahan dan diseminasi statistik;
d. Melakukan koordinasi pengelolaan dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak serta menyusun sistem pengelolaan data melakukan pengolahan data dan koordinasi pengolahan data bekerjasama dengan satuan organisasi terkait;
e. Melakukan pembuatan, implementasi, serta operasi sistem dan program aplikasi pengolahan dan diseminasi data statistik termasuk sarana pendukungnya;
f. Melakukan penyusunan, pemeliharaan, serta pengembangan sistem basis data statistik dan basis data manajemen sesuai dengan aturan yang ditetapkan;
g. Melakukan kajian dan evaluasi kebutuhan pengolahan data termasuk bahan komputer, bekerja sama dengan satuan organisasi terkait.

3.6 Model Pengembangan

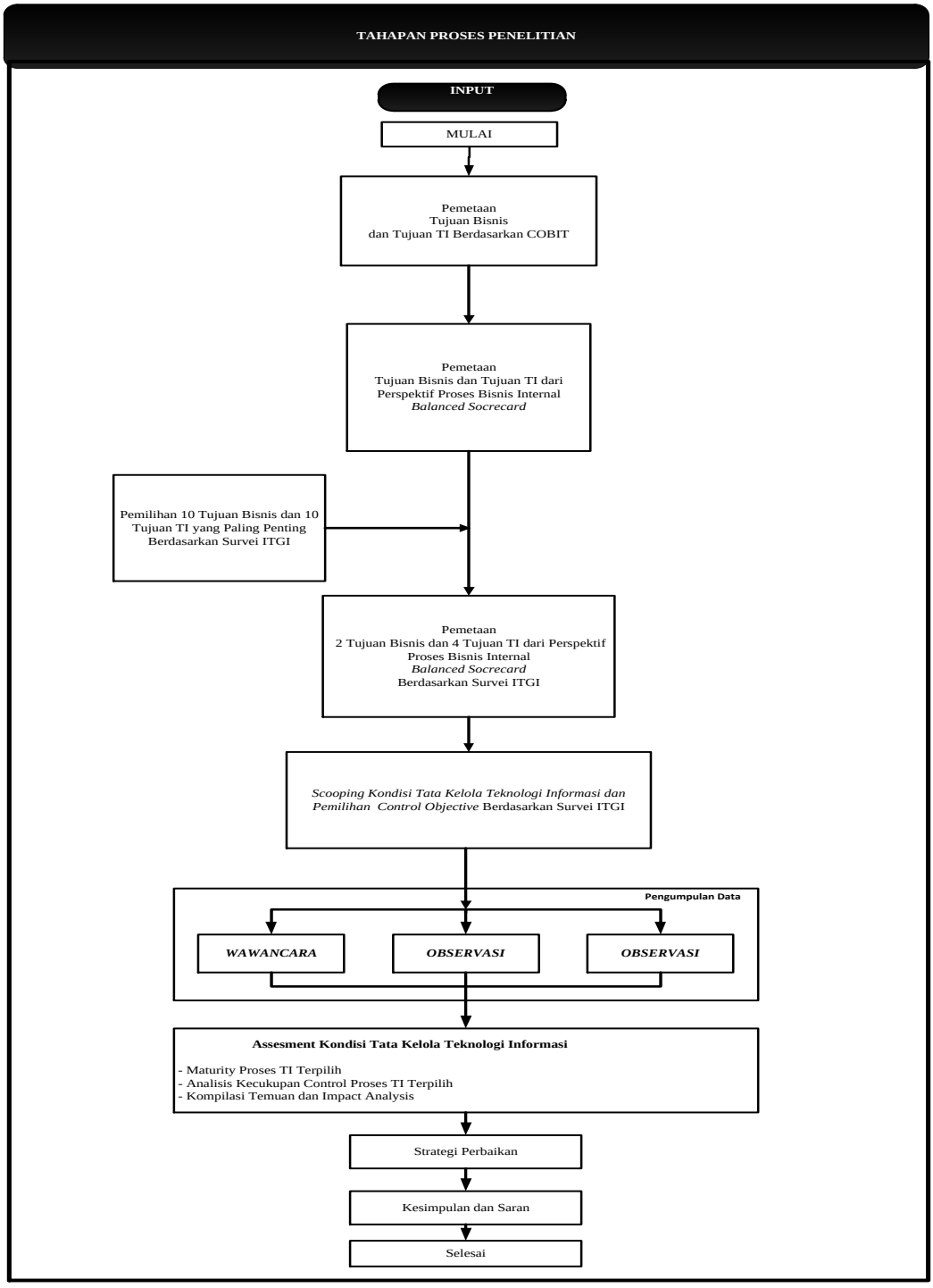
COBIT memberikan pemetaan 17 tujuan bisnis dan 28 tujuan teknologi informasi dengan melibatkan 34 *control objective*. Perspektif *proses bisnis internal Balanced Scorecard* mencakup 6 tujuan bisnis dan 17 tujuan teknologi informasi. Survei yang dilakukan oleh ITGI terhadap perusahaan-perusahaan dunia, terdapat 10 tujuan bisnis dan 10 tujuan teknologi informasi paling penting (Sarno, 2009). Berdasarkan survei tersebut, didapatkan pemetaan tujuan bisnis dan tujuan teknologi informasi dari perspektif *proses bisnis internal Balanced Scorecard* yang melibatkan 2 tujuan bisnis dan 4 tujuan teknologi informasi yang mencakup 12 *control objective*. Pemetaan *control objective* (proses teknologi informasi) disesuaikan dengan survei yang dilakukan oleh ITGI dilihat dari pemetaan balanced scorecard perspektif proses bisnis Internal tampak pada tabel 3.1 :

Tabel 3.1. Detail Pemetaan Tujuan Bisnis dan Tujuan Teknologi Informasi dan Proses Teknologi Informasi dari Perspektif *Proses bisnis internal* Berdasarkan Survei.

Perspektif Kinerja	No. Tujuan Bisnis	No. Tujuan TI	Proses Teknologi Informasi	
Perspektif Proses Bisnis/ Internal	10	6	AI1	Mengidentifikasi solusi otomatis.
			AI2	Memperoleh dan memelihara software aplikasi.
	12	2	PO1	Mendefinisikan rencana strategis TI.
			PO4	Mendefinisikan proses TI, organisasi dan keterhubungannya.

			PO10	Mengelola proyek.
			ME1	Mengawasi dan mengevaluasi kinerja TI.
		26	AI6	Mengelola perubahan.
			DS5	Memastikan keamanan sistem.
		27	DS11	Mengelola data.
			ME2	Mengawasi dan mengevaluasi kontrol internal.
			ME3	Memastikan pemenuhan terhadap kebutuhan eksternal.
			ME4	Menyediakan tata kelola TI.

Block Diagram model pengembangan pada penelitian ini digambarkan pada gambar 3.2 :



Gambar 3.2. Blok Diagram Model Pengembangan Penelitian

3.7 Teknik Analisa Data

Perencanaan pelaksanaan audit mengacu pada metodologi yang terarah, *step by step* sehingga memudahkan dalam pengimplementasiaanya. Secara garis besar, teknik analisa dalam penelitian ini meliputi (Imanuel, 2010):

1. Penentuan Ruang Lingkup Audit Teknologi Informasi

   Balanced scorecard memetakan 17 tujuan bisnis dan 28 tujuan teknologi informasi berdasarkan standar COBIT ke dalam empat perspektif kinerja, yaitu: perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif *proses bisnis internal* serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif *proses bisnis internal Balanced Scorecard* mencakup 6 tujuan bisnis dan 17 tujuan teknologi informasi. Berdasarkan hasil survei ITGI, pemetaan tujuan bisnis dan tujuan teknologi informasi dari perspektif *proses bisnis internal Balanced Scorecard* melibatkan 2 tujuan bisnis dan 4 tujuan teknologi informasi yang mencakup 12 *control objective,* hingga nanti ditemukan proses teknologi informasi terpilih yang akan digunakan dalam proses audit disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan perusahaan/instansi.

2. Survei Pendahuluan

   Survei pendahuluan dilakukan sebelum pelaksanaan audit. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam survei pendahuluan ini adalah:

   - Wawancara untuk mengetahui proses bisnis yang ada di perusahaan.
   - Observasi untuk pemrosesan dan pengkonfirmasian hasil dari wawancara serta identifikasi dokumen-dokumen yang perlu untuk analisis lebih lanjut.

- Pengumpulan bukti pendukung melalui penentuan data-data yang diaudit sesuai dengan kriteria dan tujuan audit pada Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Jawa Barat.

3. Pelaksanaan Uji Kepatutan/ Penentuan Tingkat Maturity Proses TI Terpilih

   Setelah bukti-bukti terkumpul, selanjutnya dilakukan pelaksanaan audit. Dalam pelaksanaan audit, peneliti melakukan pengujian kepatutan (*compliance test*) proses teknologi informasi yang sedang berlangsung dengan menggunakan alat bantu kertas kerja audit. Pertanyaan dalam kertas kerja diturunkan berdasarkan standar COBIT 4.1. Masing-masing pertanyaan diberi bobot sesuai dengan tingkat kepentingan dan ruang lingkup Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Jawa Barat.

   Setelah dilakukan pembobotan pada setiap pertanyaan, dapat dilakukan audit teknologi informasi. Selanjutnya, hasil dari audit dapat digunakan untuk menentukan kriteria yang ada dalam kertas kerja *Maturity level* dan diimplementasikan dalam kertas kerja audit.

4. Perhitungan Nilai *Maturity Level*

Tahapan-tahapan untuk menentukan tingkat kematangan/maturity terhadap proses-proses TI terpilih dilakukan berdasarkan kepada *COBIT 4.1-Process Maturity Assessment Tools.* Tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut :

1) Proses-proses TI terpilih yang akan dilakukan *assessment* ditentukan berdasarkan kepada survei yang dilakukan oleh ITGI, yang selanjutnya akan dilakukan assesment dengan *cobit 4.1-Process Maturity Assessment Tools.*

2) Sebelum proses *assessment* untuk setiap proses-proses TI terpilih dilakukan, tentukan juga target *score* tingkat kematangan/*maturity* setiap proses TI terpilih untuk jangka pendek dan jangka panjang.
3) Lakukan proses *assessment* untuk setiap proses-proses TI terpilih dengan format kuisioner yang telah disediakan dari *COBIT 4.1-Process Maturity Assessment Tools.*

3.7.1 Analisa Kecukupan Control Proses TI Terpilih

Analisa kecukupan control dilakukan bagi setiap proses-proses TI terpilih setelah didapatkan *score* tingkat kematangannya. Analisa kecukupan control akan mengidentifikasi control-control apa saja yang telah dipenuhi oleh setiap proses-proses TI terpilih sesuai dengan kondisi *eksisting* proses tata kelola teknologi informasi pada BPS Propinsi Jawa Barat. Analisa kecukupan control dapat meliputi kecukupan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan proses tata kelola teknologi informasi tersebut.

3.7.2 Kompilasi Temuan dan *Impact Analysis*

Berdasarkan proses perhitungan tingkat *maturity* dan proses analisa kecukupan control untuk setiap proses TI terpilih maka proses selanjutnya adalah melakukan kompilasi temuan/*finding* untuk tiap proses TI. Temuan menandakan kelemahan atau hal-hal yang negatif dari setiap proses TI yang dapat mendatangkan kerugian kepada pihak pemilik ataupun pengelola TI khususnya dalam hal keberlangsungan proses organisasi.

Dari temuan-temuan yang didapatkan pada setiap proses TI terpilih selanjutnya dapat dianalisa *impact*/dampaknya terhadap keberlangsungan

organisasi. Dampak dapat dilihat dari berbagai macam aspek, misalnya dampak kerugian secara pendayagunaan sumber daya organisasi tidak efektif dan efisien, dan masih banyak lagi dampak lainnya. Hasil dari *impact analysis* kemudian digolongkan ke dalam beberapa tingkatan/level sesuai dengan penting/tidaknya dampak yang akan ditimbulkan. Pengelompokkan tingkatan *impact analysis* dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2. Tingkatan Impact Analysis

No.	Tingkatan Impact Analysis	Keterangan
1.	*Low*	Dampak yang dihasilkan dari temuan-temuan tidak/kurang berpengaruh terhadap keberlangsungan organisasi, baik secara financial, citra organisasi, maupun penggunaan sumber daya organisasi.
2.	*Medium*	Dampak yang dihasilkan dari temuan-temuan memiliki pengaruh bagi keberlangsungan organisasi, namun masih dalam taraf yang wajar dan tidak mendatangkan kerugian secara financial, namun penggunaan sumber daya organisasi kurang optimal.
3.	*High*	Dampak yang dihasilkan dari temuan-temuan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan organisasi. Organisasi akan mengalami kerugian, citra organisasi jadi buruk, dan penggunaaan sumber daya organisasi tidak efektif dan efisien.

3.7.3 Rekomendasi Perbaikan

Hasil akhir dari proses *assessment* terhadap proses-proses TI terpilih akan memposisikan organisasi lembaga ini berada dalam tingkatan mana berdasarkan tingkat *maturity* COBIT. Rekomendasi perbaikan akan diberikan terhadap control-control TI yang tidak berjalan lemah/belum dilakukan yang akan mendatangkan dampak yang serius bagi keberlangsungan organisasi. Rekomendasi perbaikan pengelolaan TI di BPS Propinsi Jawa Barat bisa diberikan misalnya melalui perbaikan struktur organisasi pengelola TI sehingga memiliki kewenangan dan peran yang kuat dalam pengelolaan TI di lembaga, perbaikan pengetahuan dan kemampuan SDM pengelola TI sehingga memiliki kompetensi yang kompetitif, dan penerbitan kebijakan dan regulasi mengenai pengelolaan *Teknologi Informasi.*